

**TANTANGAN INSTITUSIONAL DALAM
DIGITALISASI PERENCANAAN ANGGARAN DI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Diajukan oleh:

SYAFIRA ARMELITA

NIM. 07011381924145

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI
TANTANGAN INSTITUSIONAL DALAM DIGITALISASI
PERENCANAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA
PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Diajukan Oleh:

SYAFIRA ARMELITA

NIM. 07011381924145

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing,

Pembimbing

Anang Dwi Santoso, S.AP., M.P.A
NIP. 199310072019031012



Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001



HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TANTANGAN INSTITUSIONAL DALAM DIGITALISASI PERENCANAAN ANGGARAN DI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PALEMBANG

SKRIPSI


Oleh :
SYAFIRA ARMELITA
07011381924145

Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 03 November 2023

Pembimbing :

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

Tanda Tangan



Penguji :

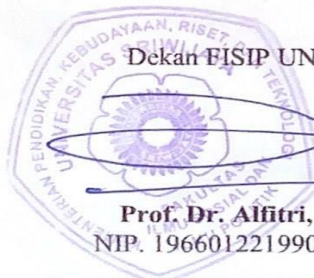
Drs. Mardianto, M.Si
NIP. 196211251989121001

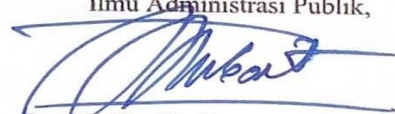


Aulia Utami Putri, S.IP., M.Si
NIP. 199508142019032020



Mengetahui,


Dekan FISIP UNSRI,
Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Publik,

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 196911101994011001

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Syafira Armelita
NIM : 07011381924145
Tempat,Tanggal Lahir : Palembang, 04 Januari 2002
Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Menyatakan dengan sungguh-sungguh bahwa skripsi dengan judul “ **Tantangan Institusional Dalam Perencanaan Anggaran Di Sekretariat Daerah Kota Palembang** ” ini adalah benar-benar karya ilmiah saya sendiri dengan arahan dosen pembimbing dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan penanggulangan plagiat di perguruan tinggi. Apabila dikemudian hari, ada pelanggaran yang ditemukan dalam skripsi ini dan/atau ada pengadaaan dari pihak lain terhadap keaslian karya ini, saya bersedia menanggung sanksi yang dijatuhkan kepada saya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh tanpa pemaksaan dari pihak manapun.

Yang membuat pernyataan
Palembang, Oktober 2023


Syafira Armelita
NIM.07011381924145

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Jika allah mengabulkan doa ku maka aku bahagia, akan tetapi jika allah tidak mengabulkan doa ku maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan allah.

(Ali bin Abi Thalib)

Tidak ada ujian yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada kesulitan yang melebihi batas kesanggupan. Karena allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar kesanggupannya.

(QS. Al-Baqarah: 286)

Atas Ridha Allah SWT, Skripsi ini saya

Persembahkan kepada :

- **Kedua orang tuaku, papa dan mama**
- **Dosen dan Staff Administrasi Publik FISIP
UNSRI**
- **Kakakku, keluarga dan sahabatku**
- **Diri sendiri serta almamater**
- **Seorang yang memberi semangat serta
senantiasa supportif.**

ABSTRAK

ABSTRAK

Era digitalisasi didalam pemerintahan harus memiliki sumber daya aparatur yang berkualitas, berintegritas, dan profesional dalam memberikan pelayanan publik untuk menjalankan proses digitalisasi. Penelitian ini memberikan gambaran tentang tantangan dan proses digitalisasi anggaran di Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam membuat perencanaan pembangunan dikarenakan digitalisasi dan perencanaan bukanlah perkara yang mudah dan harus melalui proses panjang karena pemerintah daerah harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan melakukan wawancara, observasi, dokumentasi dan studi kasus, yang diketahui bahwa dalam tantangan digitalisasi perencanaan anggaran di Sekretariat Daerah Kota Palembang masih menghadapi beberapa tantangan dalam proses dan penyesuaian program digitalisasi pemerintahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa untuk menuju sumber daya aparatur yang berkualitas dalam proses digitalisasi maka dapat dilakukan dengan memperbarui proses, sosialisasi dan kemampuan aparatur harus diasah.

Kata kunci: Digitalisasi, Perencanaan, Penganggaran.

Pembimbing



Anang Dwi Santoso, S.AP., M.P.A
NIP. 199310072019031012

Palembang, Oktober 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199401001

ABSTRACT

ABSTRACT

In the digitalization era, government must have quality, integrity and professional apparatus resources in providing public services to carry out the digitalization process. This research provides an overview of the challenges and process of budget digitization at the Palembang City Regional Secretariat in making development plans because digitalization and planning are not easy matters and must go through a long process because the regional government must consider the resources it has. By using qualitative research methods by conducting interviews, observations, documentation and case studies, it is known that the challenges of digitizing budget planning at the Palembang City Regional Secretariat still face several challenges in the process and adjustment of the government digitalization program. The results of this research show that to achieve quality apparatus resources in the digitalization process, it can be done by updating the process, socialization and the ability of the apparatus must be improved.

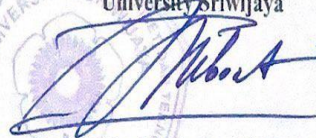
Keywords : Digitalization, Planning, Budgeting.

Advisor



Anang Dwi Santoso, S.AP., M.P.A
NIP. 199310072019031012

Palembang, October 2023
Chairman of the Departement Of Public Administration
Faculty Social and Political Science
University Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110199401001

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah SWT, karena atas berkat, Rahmat dan karunia-Nya. Sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul Tantangan Institusional Dalam Digitalisasi Perencanaan Anggaran Di Sekretariat Daerah Kota Palembang. Skripsi ini dapat diselesaikan untuk memenuhi Sebagian persyaratan dalam menempuh derajat sarjana S-1 Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya.

Atas rasa syukur yang ada peneliti mengucapkan terima kasih atas dukungan, kasih sayang, pengorbanan serta doa yang tulus untuk peneliti dari berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Untuk itu peneliti juga ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu, antara lain:

1. Allah SWT, yang telah memberikan ridho, kemudahan serta kelancaran sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kedua orang tua yang sangat kucintai, Bapak Muhammad Syafran dan Ibu Susiana yang selalu memberikan restu, motivasi, kasih sayang, dukungan moral, material dan senantiasa mendoakan anaknya selalu dalam meraih kesuksesan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
3. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si, selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Kepala Jurusan Administrasi Publik dan Dosen Penanggungjawab.
6. Bapak Anang Dwi Santoso, S.AP., M.P.A selaku pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan bimbingan untuk memperlancar penelitian.
7. Bapak Dr. M. Husni Thamrin, M.Si selaku pembimbing akademik yang telah membimbing selama masa perkuliahan.
8. Seluruh Dosen dan Staff Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang telah memberikan ilmu dan membantu kelancaran dalam masa perkuliahan.

9. Kakakku yang kusayangi selalu memberikan semangat dan bantuan sehingga dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.
10. Terima kasih untuk seorang yang baik, memberi semangat, supportif serta selalu menjadi penyemangat yang mau meluangkan waktu mendengar keluhan dan menjadi tempat nyaman untuk bertukar pikiran.
11. Sahabat seperjuanganku, Bella, Alin, Verro, Lenniza, Dea dan teman-teman yang lain Angkatan 2019 yang telah berjuang selama perkuliahan dan penulisan skripsi.
12. Diri sendiri, terima kasih telah berjuang sampai detik ini, kuat dan bertahan untuk tidak mudah menyerah dalam setiap proses yang dijalani dan pengerjaan skripsi hingga selesai. Bangga terhadap diri sendiri.
13. Ibu Etty Rossini, SE., MM selaku Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
14. Bapak Asral Yadi, SE. A.k.MM selaku Analisis Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
15. Bapak Ario Mahirnaja, SE.A.k., M.Si selaku Analisis Bagian Pelaporan Keuangan Sekretariat Daerah Kota Palembang.
16. Bapak R.M Farid Saleh, SE., M.M selaku Perencanaan Penata Sekretariat Daerah Kota Palembang.

Akhir kata peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, sehingga peneliti secara terbuka menerima setiap kritik dan saran dari pembaca. Skripsi yang ditulis ini semoga bisa dijadikan sebagai referensi pembaca terutama mahasiswa satu program studi yang sama.

Palembang, Oktober 2023

Syafira Armelita

DAFTAR ISI

Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan Skripsi	iii
Pernyataan Orisinalitas	iv
Motto dan Persembahan	v
Abstrak.....	vi
Abstract.....	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	x
Daftar Tabel.....	xii
Daftar Gambar	xiv
Daftar Istilah.....	xv
Bab I Pendahuluan.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Manfaat	7
Bab II Tinjauan Pustaka	9
2.1 Teori Kelembagaan	9
2.2 Intended Deinstitutionalisasi	10
2.3 Reinstitutionalisasi.....	11
2.4 Digitalisasi	13
2.4.1 Manfaat Teknologi Digital	14
2.5 Perencanaan.....	15
2.5.1 Tujuan Perencanaan	16
2.5.2 Fungsi Perencanaan.....	17
2.6 Anggaran	18
2.6.1 Manfaat Anggaran.....	19
2.6.2 Fungsi Anggaran	19
2.6.3 Unsur-Unsur Anggaran	21
2.7 Manajemen.....	22
2.7.1 Tujuan Manajemen.....	23

2.7.2 Fungsi Manajemen	24
2.8 Kerangka Pemikiran.....	25
Bab III Metode Penelitian	27
3.1 Jenis Penelitian.....	27
3.2 Definisi Konsep.....	27
3.3 Fokus Penelitian	28
3.4 Jenis dan Sumber Data	30
3.5 Informan Penelitian	31
3.6 Teknik Pengumpulan Data	32
3.7 Teknik Analisis Data.....	33
3.8 Sistematika Penulisan.....	34
Bab IV Hasil dan Pembahasan	36
4.1 Hasil Penelitian	36
4.1.1 Profil Instansi	36
4.1.2 Visi dan Misi	37
4.1.3 Struktur Bagian Keuangan	38
4.1.4 Bagian Administrasi Keuangan.....	38
4.1.5 Bagian Pembendaharaan dan Verifikasi	39
4.2 Struktur Organisasi.....	40
4.3 Deskripsi Informan Penelitian	40
4.4 Tantangan Digitalisasi Perencanaan	41
4.4.1 Kematangan Sistem SIPD	45
4.4.2 Anggaran Pengembangan Sistem E-SIPD	46
4.4.3 Kerjasama Kominfo	47
4.5 Dimensi Kegunaan E-SIPD.....	47
4.6 Faktor Tantangan Digitalisasi Perencanaan	50
4.6.1 E-SIPD Peningkatan Kualitas Layanan Publik	52
4.7 Persiapan Digitalisasi Anggaran	52
4.8 Persetujuan Digitalisasi Anggaran	53
4.9 Eksekusi Digitalisasi Anggaran	54
4.9.1 Pengembangan Kompetensi ASN	55

4.9.2 Kemampuan SDM.....	56
4.10 Diskusi	57
Bab V Penutup.....	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran.....	61
Daftar Pustaka.....	62
Lampiran	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Kerangka Pemikiran.....	26
Table 2 Fokus Penelitian.....	29
Tabel 3 Peraturan Sistem Informasi.....	51

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 SOP Sekretariat Daerah Kota Palembang	6
Gambar 2 Web E-SIPD	42
Gambar 3 Sistem Informasi Pembangunan Daerah	42
Gambar 4 Sistem Informasi Keuangan Daerah.....	43
Gambar 5 DPA Tahun 2021	49
Gambar 6 DPA Tahun 2022.....	50

DAFTAR ISTILAH, SINGKATAN DAN LAMBANG

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
ASN	: Aparatur Sipil Negara
BAPPEDA	: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
BKPSDM	: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
DPA	: Dokumen Pelaksanaan Anggaran
KASN	: Komisi Aparatur Sipil Negara
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah
PANRB	: Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
PEMENDAGRI	: Peraturan Menteri Dalam Negeri
PP	: Peraturan Pemerintah
RENJA	: Rencana Kerja
RKA	: Rencana Kerja Anggaran
RKPD	: Rencana Kerja Pemerintah Daerah
SDM	: Sumber Daya Manusia
SEKDA	: Sekretariat Daerah
SIPD	: Sistem Informasi Pembangunan Daerah
SKPD	: Satuan Kerja Perangkat Daerah
SOP	: Standar Operasional Prosedur
SPBE	: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
SPM	: Standar Pelayanan Minimal
SPPD	: Surat Perintah Perjalanan Dinas
SPJ	: Surat Pertanggungjawaban

TAPD : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
UU : Undang-Undang

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era digitalisasi yang serba teknologi saat ini, ada banyak tantangan dan peluang yang tidak mungkin untuk dihindari. Ini termasuk dalam sistem institusional, baik di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu dampak perkembangan teknologi digital antara lain mempercepat komunikasi dan mempermudah pekerjaan, sedangkan dampak negatifnya antara lain menumbuhkan individualisme, fitnah, dan sikap anti sosial. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana dan mengapa hambatan institusional membatasi digitalisasi penganggaran pemerintah dalam konteks negara berkembang dan bagaimana hambatannya dapat diatasi. Penganggaran pemerintah melibatkan perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian publik penerimaan dan pengeluaran sektor. Penganggaran pemerintah merupakan kegiatan lintas lembaga yang melampaui hierarki vertikal dan horizontal pemerintahan. Digitalisasi mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk memindahkan aktivitas fisik dan dokumen offline ke platform online untuk mengaktifkan interaksi elektronik (Bharadwaj, 2013; Fichman, 2014). Umumnya, teknologi digital diaktifkan jaringan komputer platform yang didukung oleh Internet untuk mempromosikan interaksi online (Janowski, 2015). Digitalisasi menawarkan peluang kepada pemerintah untuk mengatasi masalah tradisional, proses berbasis kertas.

Adanya kualitas sumber daya ASN yang baik merupakan salah satu faktor yang mendukung keberhasilan penyelenggaraan pelayanan publik yang berbasis

digital. keberhasilan penyediaan layanan publik melalui penggunaan teknologi digital. Seperti yang kita ketahui, sumber daya ASN yang ada di lingkungan yang bersifat Pelayanan publik yang berbasis digital masih memerlukan birokrasi yang jauh di bawah standar kompetensi. digitalisasi tersebut, sehingga pemerintah daerah menghadapi tantangan tersendiri dalam menyiapkan Untuk menyiapkan sumber daya ASN dalam penyelenggaraan pemerintahan agar memiliki kemampuan untuk menghadapi perkembangan arus digitalisasi berbasis teknologi, pemerintah daerah menghadapi tantangan tersendiri. Menghasilkan sumber daya untuk ASN sangat penting. agar meningkatkan kualitas untuk mencapai hasil yang optimal di lingkungan birokrasi.

Beberapa negara berkembang telah memprakarsai program untuk mendigitalkan proses pemerintahan untuk administrasi publik dan penyampaian layanan yang lebih efektif dan efisien. Masalah lain yang dihasilkan dari struktur dan budaya sektor publik termasuk divisi operasional dan politik (Beynon-Davies, 2007; Irani, 2007) serta resistensi terhadap inovasi (Seng, 2010; Zhao & Khan, 2013). Insularitas fungsional serta kurangnya integrasi dan pembagian informasi lintas departemen dan lembaga juga menjadi tantangan bagi digitalisasi (Davison, 2005). Perlawanan dari pegawai negeri karena takut kehilangan pekerjaan (Falk, 2017) juga menjadi kendala digitalisasi di sektor publik. Terlepas dari kegunaannya, digitalisasi dokumen dan aktivitas di sektor publik telah dikaitkan dengan tantangan karena terkadang gagal mempertimbangkan perbedaan antar lembaga dalam hal akses ke teknologi dan sumber daya terkait (Calvo & Campos, 2017). Dalam situasi di mana beberapa lembaga lebih maju daripada yang lain, formalisasi dan standarisasi proses digital lintas hierarki

horizontal dan vertikal pemerintah dapat menjadi masalah (Falk, 2017). Tantangan ini terutama terlihat di negara berkembang, di mana karena kesenjangan digital, agensi tidak memiliki akses yang sama ke teknologi. EJISDC (2017) 82, 5, 1-17 Terlepas dari manfaat digitalisasi, penerapannya di sektor publik dapat menjadi tantangan tersendiri (Falk, 2017). Secara umum, sifat budaya dan struktur di sektor publik dapat menjadi penghambat inovasi digital (Heeks & Stanforth, 2007; Irani, 2007; Weerakkody, 2011). Sektor publik tradisional dicirikan oleh struktur hierarkis dan berbeda serta proses birokrasi dan berbasis kertas (Davison, 2005; West, 2004) yang menyebabkan inefisiensi dan penundaan (Beynon-Davies, 2007). Paradoksnya, birokrasi di sektor publik dimaksudkan untuk mempromosikan efisiensi, kesetaraan dan demokrasi (Cordella & Iannacci, 2010). Namun, hal itu semakin menjadi sumber keterlambatan, inefisiensi (Davison, 2005) dan dokumen yang berlebihan (Wiredu, 2012). Namun, dalam banyak kasus, hasilnya gagal karena hambatan kelembagaan, sosial budaya dan teknologi (Siddiquee, 2016). Di antara hambatan yang teridentifikasi adalah struktur birokrasi yang rumit dan bertingkat yang diwarisi dari pemerintahan kolonial masa lalu (Imran, 2013), e-illiteracy dan infrastruktur TIK yang tidak memadai (Bertot et al., 2010; Heeks & Stanforth, 2007; Hendriks, 2013). Tantangan lain termasuk resistensi terhadap perubahan, perebutan kekuasaan dan kurangnya kolaborasi lintas lembaga (Schuppan, 2009) serta kegagalan untuk memperbarui undang-undang yang ada (Basu, 2004). Meskipun demikian, penelitian yang secara khusus berfokus pada hambatan institusional untuk reinstitusionalisasi e-government di negara berkembang masih

terbatas. Oleh karena itu penelitian ini berusaha untuk memperluas pengetahuan yang ada tentang hambatan inovasi e-government di negara-negara berkembang.

Pendekatan kelembagaan telah ditemukan berguna untuk mempelajari fenomena sistem informasi terkait perubahan, termasuk pengembangan sistem, implementasi, adopsi dan penggunaan (Mignerat & Rivard, 2009). Karena studi ini menyangkut digitalisasi penganggaran pemerintah sebagai bentuk perubahan kelembagaan, kami mempertimbangkan pendekatan kelembagaan sebagai lensa teoritis yang tepat.

Adapun tantangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam digitalisasi perencanaan anggaran yaitu:

- 1) Kelumpuhan Analisis.
- 2) Lebih Malas Secara Intelektual.
- 3) Pencairan dana yang terkadang sendat.
- 4) Merupakan hal baru.

Dari tantangan yang dialami oleh Badan Perencanaan anggaran Sekretariat daerah Kota Palembang, pasti adanya solusi bagi tantangan tersebut yaitu:

- 1) Pemanfaatan data yang lebih baik.
- 2) Memberikan pelatihan atau training kepada anggota organisasi.
- 3) Mengamalkan nilai budaya dan norma yang berlaku.
- 4) Menjunjung tinggi dasar-dasar negara dan konstitusi.

Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah didefinisikan sebagai kewenangan daerah untuk mengambil keputusan sendiri tentang kepentingan masyarakat setempat dan bertindak sesuai dengan keinginan masyarakat. Otonomi memungkinkan pemerintah

daerah untuk bertindak sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, dan memungkinkan mereka untuk mengelola dan mengoptimalkan sumber daya mereka sendiri.

Salah satu bagian penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah adalah Perencanaan dan penganggaran daerah adalah komponen penting dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah dan saling berhubungan. Perencanaan dan penganggaran merupakan dua hal yang sangat diperlukan untuk mengelola pembangunan daerah secara efektif dan efisien. Agar berjalan baik, Penganggaran tidak seharusnya mengontrol proses perencanaan sebaliknya, perencanaan harus mempertimbangkan kelayakan ekonomi dan ketersediaan dana agar realistis.

Hal yang paling penting yaitu digitalisasi itu sendiri Sekretariat Daerah Kota Palembang menggunakan E-GOV SIPD Se-Indonesia, Aplikasi sistem informasi pemerintahan daerah atau SIPD adalah sistem aplikasi baru keluaran kemendagri yang mulai pada tahun 2021 lalu diimplementasikan oleh pemda se-indonesia. SIPD adalah sistem yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, akuntansi laporan, pengadaan barang jasa dan barang milik daerah juga.

Dari E-SIPD yang telah dijalankan atau dilaksanakan Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Palembang adalah pemkota Palembang pertama di Indonesia yang berhasil mengimplementasikan E-SIPD diketahui berdasarkan laporan progres report penerapan SIPD.

Adapun peraturan yang mengatur perencanaan anggaran Sekretariat Daerah Kota Palembang adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

- b) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah otonom.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- Hal ini dapat terlaksanakan apabila Standar Operasional Prosedur dijalankan dengan baik oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang sebagai berikut:

Gambar 1. SOP Sekretariat Daerah Kota Palembang

No.	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Ket.
		Kepala Badan	Sekretaris	Kasubbag Perencanaan	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menugaskan Sekretaris untuk memproses penyusunan Penetapan Kinerja					Agenda Kerja	5 menit	Disposisi	
2.	Memerintahkan Kasubbag Perencanaan untuk menyusun Penetapan Kinerja					Disposisi	5 menit	Disposisi	
3.	Melaksanakan kegiatan penyusunan Penetapan Kinerja					Disposisi	6 minggu	Konsep Penetapan Kinerja, Disposisi	
4.	Mengoreksi konsep Penetapan Kinerja, jika setuju menyerahkan kepada Kaban jika tidak setuju menyerahkan kepada Kasubbag Perencanaan untuk diperbaiki					Konsep Penetapan Kinerja	1 minggu	Draft Penetapan Kinerja, Disposisi	
5.	Memeriksa Draft Penetapan Kinerja jika setuju menandatangani dan menyerahkan kepada Sekretaris, jika tidak setuju mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki					Draft Penetapan Kinerja	1 minggu	Dokumen Penetapan Kinerja, Disposisi	
6.	Menyerahkan Dokumen Penetapan Kinerja kepada Kasubbag Perencanaan untuk didokumentasikan					Dokumen Penetapan Kinerja	10 menit	Disposisi	
7.	Menyerahkan dokumen Penetapan Kinerja kepada staf Perencanaan untuk didokumentasikan					Dokumen Penetapan Kinerja	10 menit	Disposisi	
8.	Mendokumentasikan dokumen Penetapan Kinerja dan menyerahkan kepada instansi terkait					Dokumen Penetapan Kinerja	2 jam	Dokumen Penetapan Kinerja, Bukti dokumentasi	

Sumber: Rencana Kerja (RENJA SEKDA)

Era digitalisasi adalah suatu Era di mana semua hal sudah digital, dengan teknologi dan koneksi internet yang mudah diakses Kemajuan teknologi juga dapat menunjukkan kemajuan peradaban manusia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan pentingnya digitalisasi perencanaan anggaran yang efektif untuk mencapai tujuan yang mempermudah penyusunan atau perencanaan anggaran, maka perlu pengamatan lebih lanjut tentang tantangan institusional dalam digitalisasi perencanaan anggaran di sekretariat daerah kota Palembang secara baik dan optimal.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana tantangan Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam digitalisasi perencanaan anggaran?

1.3 Tujuan

Untuk mengetahui peran, upaya dari tantangan yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Palembang dalam mengakomodasikan kebijakan perencanaan anggaran dan evaluasi perencanaan Sekretariat peningkatan digitalisasi di era sekarang.

1.4 Manfaat

Penelitian yang dilakukan akan memberikan beberapa kegunaan atau manfaat yaitu antara lain:

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tinjauan Pustaka bagi penelitian dimasa depan. Selain itu diharapkan dapat menambah referensi penelitian mengenai tantangan institusional dalam digitalisasi perencanaan anggaran pada Sekretariat Daerah Kota Palembang.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah daerah dengan harapan tantangan institusional dalam digitalisasi perencanaan anggaran tersebut dapat menuai keberhasilan lebih baik dimasa yang

mendatang serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian sejenis dimasa
mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arfeen, MI & Kamal, MM (2014). Masa Depan E-Government di Pakistan: Pendekatan Studi Kasus. Konferensi Amerika ke- 20 tentang Sistem Informasi, Savannah.
- Berutu, Rahmat. Analisis Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional PT. Hexasetia Sawita Medan, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2007.
- Bastian, Indra (2006). Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia. Jakarta, Salemba Empat.
- Baptista, J. (2009). Institusionalisasi sebagai Proses Interaksi antara Teknologi dan Konteks Penggunaan Organisasinya. *Jurnal Teknologi Informasi*, 24, 4, 305-319.
- Bharadwaj, A., El Sawy, OA, Palvou, PA & Venkatraman, NV (2013). Strategi Bisnis Digital: Menuju Generasi Berwawasan Selanjutnya. *MIS Triwulanan*, 37, 2, 471-482.
- Calvo, AS & Campos, C. (2017). Meksiko: Jendela Tunggal untuk Perdagangan Luar Negeri. Dalam Falk, S., Römmele, A. & Silverman, M. (Eds.). *Pemerintahan Digital: Memanfaatkan Inovasi untuk Meningkatkan Kinerja dan Hasil Sektor Publik bagi Warga Negara* (85-104). Cham: Springer.
- Effah, J. (2016). Efek Kelembagaan pada Kewirausahaan Pembayaran Elektronik di Negara Berkembang: Pendukung dan Kendala. *Teknologi Informasi untuk Pembangunan*, 22, 2, 205-219.
- Fathurrochman, I. (2017). Pengembangan kompetensi pegawai aparatur sipil negara (asn) sekolah tinggi agama islam negeri (stain) curup. : *Manajer Pendidikan*, 11(21),

120–129.

Halim, Abdul dan Theresia Woro Damayanti (2007), *Pengolaan Keuangan Daerah*.

Yogyakarta UPP STIM YKPN.

Latif, M., Wijaya, A. F., & Domai, T. (2014). *Perencanaan Anggaran Belanja Bantuan*

Sosial Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. *Wacana Journal of Social and Humanity Studies*, 17(2), 78-87.

Nurwahida, *Perencanaan dan Pengawasan Biaya Operasional Pada PT. Karya Pratama*

Niaga Jaya, Skripsi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah Asahan, 2014.

Putri, E. E. (2019). *Optimalisasi E-Planning Dalam Sinkronisasi Dokumen Rencana Kerja*

Dan Dokumen Pelaksana Anggaran Di Kabupaten Gresik. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.

Ritonga, Irwan Taufik (2009). *Perencanaan dan Penganggaran Keuangan Daerah di*

Indonesia, Yogyakarta, Sekolah Pasca Sarjana UGM.

Saputra, D. P., & Kurniawansyah, F. (2020). *Tantangan BKD Kota Malang Dalam*

Menyiapkan ASN Di Era Digital. *Prosiding Simposium Nasional "Tantangan Penyelenggaraan Pemerintahan di Era Revolusi Indusri 4. O"*, 1320-1350.

Suhadak, dan Trilaksono Nugroho, (2007). *Paradigma Pengolaan Keuangan Daerah*

dalam Penyusunan APBD di Era Otonomi. Malang, Bayu Media Publishing.